



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MEMBUAT,
MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5611/SJ tanggal 2 Oktober 2015 hal Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, yang menyatakan segera mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan untuk meningkatkan mutu dan memangkas pelayanan perizinan dan Non Perizinan di Daerah;
- b. bahwa jenis dan nama perizinan berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan Dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) mengalami perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan Dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20m.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MEMBUAT, MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT).

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Wewenang, Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Di tetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2016

WALIKOTA BENGKULU,
dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 35 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BENGKULU NOMOR 07 TAHUN
 2009 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
 MEMBUAT, MENGELUARKAN DAN
 MENANDATANGANI PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT)

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPahkan
 KE BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
 KOTA BENGKULU

I. PERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN	KET.
1	2	3
1.	Retribusi Izin Gangguan (HO)	
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	
3.	Izin Usaha Industri (IUI)	
4.	Izin Perluasan (IP)	
5.	Izin Usaha Pematangan Hewan dan Penjualan Hasil Ternak	
6.	Izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK)	
7.	Izin Mendirikan Bangunan (IPMB/IMB/IB)	
8.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	
9.	Izin Penumpukan Hasil Hutan	
10.	Izin Usaha Ternak	
11.	Izin Penelitian	
12.	Izin Usaha Perikanan (IUP)	
13.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	
14.	Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak	
15.	Izin Pelayanan Ketenagakerjaan	
16.	Izin / Pengesahan Penggunaan Peralatan Kerja	
17.	Izin Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu	
18.	Izin Prinsip Penanaman Modal	
19.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	
20.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	
21.	Izin Usaha Penanaman Modal	
22.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	
23.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	
24.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	
25.	Pendaftaran Penanaman Modal	
26.	Izin Air Tanah	
27.	Izin Pengusahaan Air Tanah	
28.	Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah	
29.	Izin Pengeboran Air Tanah Perorangan (terdaftar)	
30.	Izin Juru Bor	
31.	Izin Tanda Instalasi Bor	
32.	Izin Pengeboran Air Tanah	
33.	Izin Usaha Salon Kecantikan	
34.	Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran	
35.	Izin Trayek	
36.	Izin Pendirian Kerambah Apung	

37.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
38.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	
39.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C	
40.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C	
41.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe D	
42.	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe D	
43.	Izin Operasional Puskesmas	
44.	Izin Mendirikan dan Operasional Klinik	
45.	Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	
46.	Surat Izin Apotek (SIA)	
47.	Surat Izin Toko Obat (SITO)	
48.	Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)	
49.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	
50.	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	
51.	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)	
52.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	
53.	Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	
54.	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	
55.	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	
56.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	
57.	Surat Izin Praktek / Kerja Tenaga Gizi (SIP-TG/SIK-TG)	
58.	Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)	
59.	Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF)	
60.	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	
61.	Surat Izin Kerja Refkasionis Optisien (SIKRO)	
62.	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG)	
63.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	

II. NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN	KET.
1	2	3
1.	Rekomendasi Penyebaran Peletakan Titik Reklame	
2.	Tanda Daftar Lembaga Formal Non Formal	
3.	Rekomendasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
4.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata	
5.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Hiburan/Impresariat	
6.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Akomodasi	
7.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Makanan dan Minuman	
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa	
9.	Tanda Daftar Industri (TDI)	
10.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
11.	Tanda Daftar Usaha Gudang (TDG)	
12.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	
13.	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	
14.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	
15.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Akomodasi	
16.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	
17.	Sertifikat Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan	

WALIKOTA BENGKULU,
 dto
 H. HELMI HASAN